

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pentingnya Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan kesadaran pemerintahan global akan pentingnya menciptakan dunia yang aman dan damai. Banyak negara yang berupaya untuk menjaga perdamaian dunia dengan tetap melakukan kerja sama internasional yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi negara dan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman menciptakan kondisi yang damai dengan menghilangkan konflik seperti perang bukanlah satu-satunya tujuan yang diharapkan dapat terjadi selama proses kerja sama tersebut. Kesadaran setiap negara akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, seperti kesetaraan gender, masalah ekonomi, hingga kesehatan merupakan fokus yang mulai menjadi perhatian.

Masalah kesehatan global telah menjadi salah satu permasalahan yang dibahas dalam konferensi yang diadakan oleh Brazil dan Tiongkok pada April 1945 sebelum Perang Dunia benar-benar berakhir.<sup>1</sup> Tanggapan yang diberikan PBB adalah dengan membentuk sebuah organisasi yang diharapkan dapat mengatasi masalah kesehatan global. PBB membentuk World Health Organization (WHO)

---

<sup>1</sup> United Nation, "History of the UN," *United Nations*.

pada 7 April 1948 yang diharapkan dapat menjawab kekhawatiran dunia terhadap masalah kesehatan global.

WHO berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas kesehatan masyarakat dunia meski WHO bukanlah organisasi kesehatan internasional pertama dalam sejarah. Sebagai Organisasi Internasional WHO harus mampu merangkul seluruh negara untuk dapat berpartisipasi meningkatkan kualitas kesehatan global. Banyak fenomena dan tema yang diangkat oleh WHO untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa fenomena yang menarik perhatian WHO karena dianggap sebagai suatu fenomena yang cukup penting adalah kualitas kesehatan mental. Melihat keseriusan setiap negara untuk menangani gangguan mental masyarakatnya, WHO menanggapi dengan menetapkan 10 Oktober sebagai hari kesehatan mental sedunia. Tema yang dibahas oleh WHO pada tahun 2021 adalah "*Perawatan kesehatan mental sedunia: mari kita wujudkan.*" Berbagai tema yang diangkat oleh WHO dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan jasmani. Upaya yang dilakukan WHO tidak berhenti sampai pada tema-tema dalam perayaan kesehatan mental sedunia tetapi WHO juga mengeluarkan berbagai program. Program yang mulai diperkenalkan oleh WHO pada tahun 2013 adalah *Mental Health Action Plan*. Program ini dimaksudkan dapat membantu setiap negara agar dapat mengurangi fenomena bunuh diri setidaknya 10% pada tahun 2020.

Gangguan mental seperti depresi dapat memengaruhi kinerja seseorang dalam melakukan aktivitas seperti hilangnya konsentrasi, hilangnya nafsu makan, merasa tidak diinginkan, rasa ingin menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri.

Sekretariat Jendral PBB pada laporannya tahun 1991 menyebutkan tindakan bunuh diri merupakan salah satu fenomena global yang perlu untuk segera diatasi, terutama pada kalangan remaja. Pada tahun 1993, WHO dan PBB mengadakan sebuah pertemuan yang membahas mengenai strategi nasional untuk menangani tindakan bunuh diri di Kanada. Meningkatnya fenomena bunuh diri di Kanada pada saat itulah yang membuat PBB dan WHO merasa perlu untuk segera melakukan tindakan lebih lanjut. WHO mengeluarkan inisiatif global untuk menangani tindakan bunuh diri yang disebut dengan *Suicide Prevention* (SUPRE) pada tahun 1999. Inilah tujuan dan peran WHO untuk berkontribusi meningkatkan dan menjamin kesehatan jasmani dan mental masyarakat dunia.<sup>2</sup>

Kualitas kesehatan mental seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Masyarakat yang hidup di bawah tekanan memiliki mental yang cenderung tidak stabil yang dapat menjadi akar dari penyebab bunuh diri. Adanya kesenjangan sosial akibat dari pembagian kelas menjadi pemicu sebagian besar masyarakat mengalami tekanan sosial, ekonomi, maupun diskriminasi kelas. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan seorang ahli sosiologi asal Prancis, Émile Durkheim, yang menemukan fakta bahwa pemicu bunuh diri didasarkan pada berbagai faktor sosial, seperti struktur hubungan sosial, kesenjangan sosial, dan tekanan sosial.

Faktor sosial yang ditekankan oleh Durkheim berkaitan dengan angka bunuh diri bisa dikaji dalam penelitian tentang kondisi sosial dan ekonomi

---

<sup>2</sup> World Health Organization, "WHO: Guardian of Health," accessed April 18, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=p7liQk45fFk>.

masyarakat Jepang. Sebagai salah satu anggota *Group of 7 (G7)*, Jepang merupakan negara yang perekonomiannya cukup maju. Hal ini menyebabkan daya saing masyarakat Jepang sangat tinggi. Tingginya daya saing para pelajar dan pekerja di Jepang menjadi salah satu penyebab masyarakat Jepang ‘kurang’ memperhatikan kesehatannya. Mereka cenderung menggunakan energi dan jerih payahnya untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi hingga promosi jabatan. Dilansir dari berbagai sumber, persaingan dan tekanan sosial banyak menimpa masyarakat menengah ke atas. Tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh remaja Jepang berakar dari tidak adanya dukungan orang tua terhadap cita-cita mereka. Hal ini menyebabkan banyak remaja yang takut untuk menghadapi masa depan dan khawatir tidak bisa memenuhi harapan orang tua serta lingkungan sosialnya. Peristiwa ini merupakan salah satu pemicu banyak warga Jepang yang mulai menghilang (*hikikomori*), menyakiti dirinya sendiri hingga bunuh diri atau yang dikenal dengan istilah *jisatsu*.

Berbagai cara dilakukan masyarakat Jepang untuk mengakhiri hidupnya seperti gantung diri, menggunakan senjata api, sengaja menenggelamkan diri ke dalam air, hingga mengkonsumsi obat-obatan dengan dosis tinggi, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Tingginya kasus kematian akibat bunuh diri di Jepang yang mulai meningkat di tahun 2000an membuat Jepang masuk ke dalam lima negara dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia pada tahun 2016. Situs resmi pemerintah Jepang, *National Police Agency*, menyebutkan jumlah kasus bunuh diri pada setiap kelompok usia masyarakat Jepang mengalami penurunan, tetapi pada kelompok

usia 10-19 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2019.<sup>3</sup> Berdasarkan data dari The Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT) sekitar 415 siswa yang duduk pada bangku SMA hingga SD dilaporkan melakukan tindakan bunuh diri selama pandemi. Tingginya fenomena bunuh diri di Jepang dan berbagai negara di dunia menjadi suatu masalah bagi pemerintah yang diharapkan dapat segera diatasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembenahan pada masalah kesehatan.

Percobaan dan tindakan bunuh diri merupakan masalah serius bagi pemerintah Jepang mengingat tindakan ini mulai banyak dilakukan oleh para remaja. Meningkatnya angka bunuh diri di Jepang terutama pada kalangan remaja serta rendahnya angka kelahiran di Jepang menjadi salah satu pemicu fenomena ini perlu segera ditangani. Penurunan angka kematian akibat bunuh diri yang terjadi tidak menjadikan pemerintah Jepang akhirnya merasa tenang dengan mengabaikan fenomena ini. Pemerintah tetap melihat fenomena bunuh diri sebagai fenomena yang serius mengingat angka kelahiran di Jepang yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian masyarakat Jepang. Pemerintah sendiri menandakan bahwa pada tahun 2017 Jepang mencetak angka kelahiran terendah sejak kementerian kesehatan Jepang mengumpulkan data kelahiran dan kematian pada masyarakat Jepang. Kondisi demikian dapat menyebabkan Jepang lambat laun menjadi negara dengan tingkat produktifitas yang rendah karena tidak adanya tenaga kerja yang memadai.

---

<sup>3</sup> Ministry of Health Labour and Welfare; National Police Agency, "Suicide in 2019" (2020).

Pemerintah Jepang menanggapi keseriusan ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan melakukan berbagai kerja sama dengan Organisasi Internasional seperti WHO. Jepang sendiri telah bergabung menjadi anggota WHO sejak 16 Mei 1951 yang kantor pusatnya berada di Taipei, Taiwan hingga 1958 sebelum akhirnya tanggung jawab WHO terhadap Jepang dipindahkan ke Wilayah Pasifik Barat. Bentuk kerja sama WHO dan Jepang terlihat dari kebijakan Jepang yang dibentuk berdasarkan arahan dari program WHO dalam rangka menangani fenomena bunuh diri.

Fenomena bunuh diri menjadi fenomena yang penting untuk dikaji guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa baik faktor sosial, ekonomi, maupun kesehatan dapat menjadi faktor pemicu tindakan bunuh diri. Setiap pihak yang berinteraksi langsung dengan tindakan bunuh diri baik itu para ahli, pemerintah, *Non-Governmental Organizations* (NGO), dan pihak lainnya tidak bisa melihat penyebab bunuh diri hanya dari satu sisi. Maka dari itu, masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga stabilitas mentalnya sendiri. Terlepas dari itu, lingkungan sosial juga tetap harus diperhatikan dengan menghilangkan diskriminasi dan mengurangi kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan tekanan pada masyarakat. Fenomena ini menunjukkan pentingnya untuk menjalin kerja sama antara negara, Organisasi Internasional, media, hingga masyarakat itu sendiri agar fenomena ini dapat ditangani dengan baik. Jepang bisa dijadikan sebagai contoh negara yang memiliki sifat terbuka terhadap keberadaan Organisasi Internasional untuk menyelesaikan masalah dalam negaranya.

Bunuh diri yang terjadi di Jepang menandakan perlunya strategi untuk meningkatkan jaminan terhadap keamanan. Keamanan yang dimaksud tidak lagi mengacu pada keamanan militer, namun juga harus mencakup Keamanan Insani. United Nations Development Programme (UNDP) menjabarkan tujuh elemen yang terdapat dalam Keamanan Insani dan salah satunya adalah keamanan kesehatan. Kesehatan memiliki nilai yang sama pentingnya dengan keamanan politik, dan ekonomi. Keberhasilan suatu negara dan Organisasi Internasional dalam menjaga Keamanan Insani seperti upaya WHO dan pemerintah Jepang dalam menangani fenomena bunuh diri akan membantu PBB dalam mewujudkan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG) yaitu mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular dengan meningkatkan kesehatan mental. Tujuan SDG yang diharapkan dapat terealisasikan pada tahun 2030 termasuk penanganan fenomena bunuh diri akan menunjukkan keberhasilan suatu negara dan Organisasi Internasional dalam kerja sama internasional untuk menjamin Keamanan Insani demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat global.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kebijakan, dan program penanganan fenomena bunuh diri di Jepang menjadi salah satu aspek penting dalam melakukan penelitian ini. Setiap keputusan dan langkah yang dibuat menentukan masa depan masyarakat Jepang, terutama mengenai kesehatan mental masyarakatnya. Tentu tidak mudah bagi pemerintah dan WHO untuk mengurangi angka bunuh diri, maka penting juga untuk meneliti

adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini akan dikaji dengan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerja sama WHO dan pemerintah Jepang untuk menangani tingginya fenomena bunuh diri di Jepang (2017–2020 )?
2. Apa tantangan kerja sama WHO dan Jepang dalam penanganan fenomena bunuh diri di Jepang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penulis merangkum tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menggambarkan program dan kebijakan yang dibentuk oleh WHO dan pemerintah Jepang dalam penanganan fenomena bunuh diri yang tinggi di Jepang.
2. Mengidentifikasi tantangan dalam kerja sama WHO dan pemerintah Jepang ketika menjalankan kebijakan tersebut dalam rangka menangani fenomena bunuh diri di Jepang.

### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini ditulis bukan sekedar untuk memenuhi syarat kelulusan, penulis memiliki harapan dengan penyelesaian penelitian ini, maka akan ada manfaat dan kegunaan. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan mental. Penelitian ini juga akan bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang langkah

yang telah dan/atau sedang diambil oleh pemerintah Jepang dan WHO untuk menangani fenomena bunuh diri. Secara akademis, penelitian ini akan memudahkan pemahaman masyarakat untuk menerapkan dan turut membantu pemerintah dan WHO untuk menekan angka kematian akibat bunuh diri guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jepang akan menjadi negara yang tidak hanya maju dalam sektor perekonomian, tetapi juga maju dalam sektor kesehatan dengan meningkatkan kualitas kesehatan mental masyarakat.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi dalam lima bagian dalam sistematika penulisan. Sistematika tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**BAB I:** Pada bagian ini penulis menjelaskan latar belakang pentingnya mengkaji fenomena bunuh diri yang terus meningkat di Jepang. Pada bagian ini penulis juga menjabarkan batasan masalah dalam melakukan penelitian terkait fenomena bunuh diri, tujuan dilakukannya penelitian, hingga kontribusi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

**BAB II:** Bagian ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa literatur dari penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini juga terdapat dalam BAB II.

**BAB III:** Bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan, teknik penulis dalam mengumpulkan data, hingga teknik yang dilakukan penulis ketika melakukan analisis terkait data yang didapatkan.

BAB IV: Bagian ini berisi pembahasan yang dapat menjawab batasan masalah dalam penelitian ini. Pada bagian ini penulis menjelaskan evolusi bunuh diri dalam masyarakat. Penulis juga menjabarkan beberapa program WHO dan Jepang yang mencerminkan upayanya dalam menangani fenomena bunuh diri, dan penulis juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh WHO dan Jepang selama proses kerja sama tersebut.

BAB V: Bagian terakhir dalam penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penulis menjelaskan secara singkat mengenai hasil temuan dari rumusan masalah pada penelitian ini serta memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

